

INKONSISTENSI KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP ISLAMIC STATE OF SYRIA DAN IRAQ /ISIS (2013-2015)

Ibnu Zulian

Univeristas Muhammadiyah Yogyakarta
ian_ib@ymail.com

ABSTRAK

Sebagai negara adidaya Amerika Serikat selalu berusaha menjadi penguasa dunia untuk menegakkan nilai-nilai Amerika di seluruh muka bumi dengan dukungan ekonomi besar dan kekuatan militer raksasa. Dengan demikian, AS sering dituding banyak pihak menjalankan Kebijakan internasional “bermuka dua” atau standar ganda sebagaimana berkaitan dengan sikap AS terhadap Timur Tengah. Konon, salah satu pegangan kunci AS ialah apa yang disebut sebagai *minus malum*, yaitu harus memilih yang kurang buruk ketika menghadapi yang terburuk.

Pragmatisime politik mempermasalahkan bagaimana negara dapat berfungsi, dalam arti segala konsekuensi dan tindakan selalu mengacu pada individu, kelompok, dan masyarakat secara menyeluruh. Bisa dikatakan politik Amerika Serikat berorientasi pada tujuan dan hasil yang akan diperoleh, dengan tidak memperhatikan cara atau mekanisme pencapaiannya. Tidak mengejutkan apabila seringkali kita menemukan inkonsistensi dan kontroversi dalam Kebijakan Luar Negeri AS, meskipun idealisme dan identitas dipertimbangkan dalam pengambilan Kebijakan Luar Negeri AS, namun kepentingan secara pragmatis pada akhirnya memaksa AS pada kebijakan-Kebijakan yang ironis serta kontradiktif.

Penulis membahas Kebijakan Luar Negeri AS terhadap ISIS dengan kebaruan kajian tentang Inkonsistensi sebuah Kebijakan dengan menggunakan teori Pragmatisme dan melacak faktor-faktor yang mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri AS melalui tipologi strategi politik luar negeri dari buku John. P. Lovell, yang model strategi ini dicetus oleh William D. Coplin. Inkonsistensi sangat berkaitan dengan berbagai kebijakan baik ekonomi, politik, militer dan lain-lain. Inkonsistensi berkaitan juga dengan pragmatisme yang merupakan *the way of life* bangsa Amerika. AS juga mengakui bahwa politik luar negeri adidaya itu adalah pragmatisme dan AS selalu menjadi “pendamai”, pragmatisme mengajarkan betapa pentingnya pengalaman sebagai bagian dari perkembangan dan kemajuan hidup manusia.

Dengan demikian penulis menemukan dinamika dalam invasi menjadi pengaruh besar terhadap proses kebijakan AS yang tidak hanya di lembaga legislatif saja, namun secara eksekutif yaitu hak prerogatif presiden AS yaitu Barack Obama sangat berpengaruh sekali terhadap inkonsistensi kebijakan AS itu sendiri.

Kata Kunci: Amerika Serikat, Pragmatisme, Kebijakan Luar Negeri, Inkonsistensi.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Amerika Serikat (AS) adalah negara unik yang di dalamnya terdiri berbagai bangsa bersatu padu menjadi sebuah negara adidaya, yakni selalu berusaha menjadi penguasa dunia untuk menegakkan nilai-nilai Amerika di seluruh muka bumi dengan dukungan ekonomi besar dan kekuatan militer raksasa. Dengan demikian, AS sering dituding banyak pihak menjalankan Kebijakan internasional “bermuka dua” atau standar ganda sebagaimana berkaitan dengan sikap AS terhadap Timur Tengah. Konon, salah satu pegangan kunci AS ialah apa yang disebut sebagai *minus malum*, yaitu harus memilih yang kurang buruk ketika menghadapi yang terburuk.

Kini berkembang pula istilah baru yaitu Inkonsistensi kebijakan AS, ini merupakan diskripsi dan persepsi masyarakat dunia terhadap AS masa kini, yakni Kebijakan Luar Negeri yang tidak sesuai dengan kesepakatan/keputusan awal internal baik eksekutif maupun legislatif pemerintah AS, inkonsistensi sangat berkaitan dengan berbagai kebijakan baik ekonomi, politik, militer dan lain-lain. Inkonsistensi berkaitan juga dengan pragmatisme yang merupakan *the way of life* bangsa Amerika (Albertine, 2006: 89). AS juga mengakui bahwa politik luar negeri adidaya itu adalah pragmatisme dan AS selalu menjadi “pendamai”, pragmatisme mengajarkan betapa pentingnya pengalaman sebagai bagian dari perkembangan dan kemajuan hidup manusia.

Sebagai negara liberal dan disaat ini eksekutifnya dikuasai Demokrat yakni presiden Barack Obama, maka dapat diasumsikan bahwa penguasa demokrasi liberal sangat menghindari akan peperangan dan demokrasi menjadi seutuhnya pemenang di AS. namun nyatanya saat ini terjadi inkonsistensi akan hal itu. Banyak kasus yang bersifat inkonsistensi seperti kebijakan persenjataan/militer AS terhadap India yang tidak sesuai kesepakatan atau isi perjanjian, begitu juga konflik peperangan antara Israil dan Palestina di mana AS sebagai penggaung utama Hak Asasi Manusia (HAM) belum mampu konsisten terhadap kebijakan yang dibuatnya. Memang begitu tebal dinding kepentingan (*national interest*) AS sehingga belum mampu mendobrak inkonsistensi AS yang seharusnya konsisten terhadap kebijakannya.

Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Timur Tengah, khususnya Iraq dan Suriah merupakan sebuah organisasi yang bergerak dalam metode invasi yang begitu radikal atau ekstrim yang terus mencaplok dan membuat sensasi. AS sebagai polisi dunia tidak mungkin berdiam diri karena hal-hal yang berkaitan dengan Timur Tengah menjadi isu yang selalu diperhitungkan pemerintah AS.

Dinamika Strategi ISIS, termasuk juga pembunuhan massal dan penculikan anggota kelompok keagamaan dan suku, pemenggalan tentara dan wartawan, memicu kekhawatiran dan kemarahan dunia dan campur tangan militer AS. Namun memusnahkan ISIS tidak semudah menginvasi Iraq dan Afganistan sehingga membuat delima pemerintah AS, ketangguhan ekonomi ISIS dan kelengkapan alat perang menjadi salah satu alasan membuat AS sedikit kalangkabut. Tetapi pergerakan AS yang lambat dalam mengambil sikap menjadi pertanyaan besar masyarakat dunia, solusi-solusi menghindari perang hingga sikap tidak *all out* seperti yang AS sudah lakukan terhadap Irak menjadi kontradiktif sehingga kritik pemerintah AS untuk lebih proaktif selalu

hadir baik internal maupun eksternal pemerintah (Septi, 2014: 10). Dalam fenomena ini penulis melihat ada-nya dinamika dalam invasi menjadi pengaruh besar terhadap proses kebijakan AS yang tidak hanya di lembaga legislatif saja, namun secara eksekutif yaitu hak prerogatif presiden AS yaitu Barack Obama sangat besar pengaruhnya terhadap inkonsistensi kebijakan AS itu sendiri.

Kehadiran Presiden Obama telah memberi warna baru pada Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Barack Obama menjanjikan corak kemitraan AS yang baru di Timur Tengah sebagai awal diplomasi yang berakar dari “Saling Hormat dan Berbagi Kepentingan” dan dalam corak kemitraan ini begitu mudah terjadi berbagai polemik yang bersifat inkonsistensi. Oleh karena itu, penulis mengali lebih dalam baik secara sistemik maupun analitik (non sistemik) dengan bagaimana proses pemerintah AS dengan konsistensi kebijakan institusinya yang menyatakan perang terhadap eksterisme atau terorisme serta penegakkan HAM yang kuat yang telah disepakati sepenuhnya yang kemudian terjadi inkonsistensi begitu saja. Dan sudah barang tentu hal ini berpengaruh terhadap AS secara persepsi dalam hubungan internasional.

Rumusan Masalah

Penulis merumuskan permasalahan dengan pertanyaan yang bersifat struktural objektif yaitu: **Mengapa terjadi inkonsistensi pada kebijakan invasi AS terhadap ISIS?**

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penulis mengangkat penelitian ini adalah :

1. Melacak sejarah pola hubungan kerjasama antara AS dengan jihadin Timur Tengah.
2. Menemukan data ilmiah atas upaya-upaya AS dalam membangun hegemoni dan invasi di Timur Tengah.
3. Mengetahui bentuk kebijakan luar negeri AS khususnya pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama.
4. Mengetahui berbagai dampak kebijakan AS terhadap ISIS.
5. Mengetahui peran AS di Timur Tengah terutama pada masa bangkitnya ISIS hingga kini.

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfa’at seperti:

1. Menemukan secara rinci maksud yang sebenarnya dari inkonsistensi kebijakan invasi AS.
2. Memunculkan pemahaman baru terhadap dampak inkonsistensi kebijakan AS terhadap ISIS.
3. Memberikan referensi baru akan sikap dari pemerintahan AS dalam menghadapi gerakan radikalisme masa kini.

Kajian Pustaka

I. Inkonsistensi Kebijakan Amerika Serikat

Dalam jurnal Anthony H. Cordesman (2014) yang berjudul *The New “Great Game” in the Middle East: Looking Beyond the “Islamic State”* menyebutkan sekaligus menawarkan strategi realistis bagi AS yang seharusnya menemukan solusi jangka pendek tanpa harus berperang langsung terhadap ekstrimisme. Cara ini merupakan strategi penerimaan suatu kepentingan demi menghindari kompleksitas dan ketidakpastian baru. Permainan besar AS ini merupakan kepentingan untuk diterima seperti sikap politik dalam negeri, konsekuensinya AS harus mengambil risiko dan bahkan pilihan terbaik dinilai akan gagal. Hasil akhirnya, kebutuhan perang yang jelas untuk strategi yang lambat dan realis. Kondisi yang lambat dan sabar ini (tarik ulur) merupakan sebuah perhitungan yang tidak jarang AS dipandang inkonsisten oleh dunia atau politik standar ganda menjadi cerita klasik masa lalu dan kini, sehingga dalam buku Sidik Jatmika (Jatmika, 2000: 13-14) yang berjudul *AS Penghambat Demokrasi: Membongkar Politik Standar Ganda* menjelaskan bahwa di balik retorika penegakan HAM dan demokrasi, banyak dipengaruhi kepentingan sendiri, yaitu kepentingan akan manfaat bagi tujuan-tujuan tertentu bahkan sekalipun melanggar kaidah-kaidah HAM, sehingga pada hakikatnya sering mengabaikan kepedulian terhadap HAM manusia itu sendiri, yang terpenting di antara kepedulian-kepedulian itu adalah kepentingan nasional dan global AS di bidang ekonomi, politik, dan strategi keamanan.

Kemudian dalam tesis Monica Dian Adelina (2012) yang berjudul *Dinamika Politik Luar Negeri AS terhadap Kelompok Uighur* yang rumusan masalahnya sama-sama menanyakan mengapa terjadi inkonsistensi kepada Kebijakan AS ini berusaha menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadi dinamika kebijakan luar negeri AS terhadap kelompok Uighur, mahasiswa UI ini menyimpulkan bahwasanya dibalik inkonsistensi AS terhadap negara lain adalah adanya kepentingan nasional yang ingin dicapai AS seperti kepentingan ekonomi dan strategis, kemudian dibalik inkonsistensi AS sangat membahayakan keamanan internasional dengan ada inkonsistensi tersebut justru memperkeruh hubungan AS dengan negara lain. Bisa dikatakan Kebijakan Luar Negeri AS tidak terprediksi dan terencana dengan baik.

2. Dinamika Strategi kebijakan Amerika Serikat

Melacak lagi beberapa tesis mahasiswa lain seperti Pascasarjana dan Kedokteran di bidang Hubungan Internasional. Penulis mendapatkan beberapa penelitian yang sama dalam hal kebijakan AS terhadap Timur Tengah yaitu penelitian Mian Ahad Hayaud-Din (2003) mahasiswa dari University of South Florid yang berjudul *U.S. Foreign Policy in Islamic South Asia: Realism, Culture, and Policy Toward Pakistan and Afghanistan*, tujuan dari penelitian Mian ini untuk menguji apakah penggunaan lanjutan dari teori realis diperkuat berdasarkan rekor keberhasilan dan kegagalan kebijakan masa lalu. Salah satu argumen inti terhadap realisme adalah bahwa tingkat analisis terlalu kaku, sehingga gagal untuk mengenali kendala internal dalam urusan negara. Dari sekian banyak masalah internal yang dihadapi negara, tidak lebih besar daripada peran budaya dalam konteks sosial di wilayah ini. Hal ini dicontohkan dalam studi kasus dari tiga peristiwa yang paling penting yang mempengaruhi kebijakan AS. Memeriksa dasar dan penerapan kebijakan berdasarkan realis menuju wilayah

tersebut, penelitian ini kemudian akan mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan kebijakan AS. Evaluasi ini didasarkan pada analisis dari tujuan yang telah ditetapkan dibandingkan dengan hasil dari tindakan kebijakan.

Kemudian penulis menemukan lagi tulisan dari Scott Eric Kofmeh (2008) mahasiswa dari London School of Economics and Political Science yang berjudul **U.S. Foreign Policy and Post-Conflict State-Building**, tesis ini mengevaluasi Kebijakan Luar Negeri AS mengenai pasca konflik pada masa pembangunan negara, khususnya strategi AS dan perencanaan untuk periode pasca konflik langsung. Melalui pendekatan kelembagaan berdasarkan Allison & Zelikow Model II paradigma perilaku organisasi, (1999). Tesis ini juga mengidentifikasi masalah sumber daya, dan kebijakan struktural yang menciptakan tantangan kelembagaan untuk pasca-konflik strategi pembangunan negara dan perencanaan dalam proses pembuatan Kebijakan Luar Negeri AS.

Dari uraian di atas ada beberapa persamaan subjek dan objek penelitian yang mengarah pada Timur Tengah. Apabila membicarakan kebijakan AS secara internal dan eksternal terhadap Timur Tengah bisa dikatakan hampir sama secara proses dengan penulis tesis ini, namun perbedaannya adalah pada objektif penelitian di mana penulis mengangkat judul **Inkonsistensi Kebijakan Luar Negeri AS terhadap ISIS (2013-2015)**. Oleh karena itu, perbandingan-perbandingan invasi sebagai modal primer penulis mengkaji kembali kebijakan AS yang bersifat inkonsisten. Sehingga ini menjadi ukuran penulis melacak kebijakan AS terhadap terorisme atau ekstrimisme masa kini.

Kerangka Teori

I. Konsep

Kebijakan Luar Negeri

Dalam memahami studi kebijakan politik luar negeri, kita harus berangkat dari sebuah lima unsur dasar ilmu politik. Dalam lima unsur tersebut adalah (1) Negara, (2) Kekuasaan, (3) Pengambilan keputusan, (4) Kebijakan, (5) Atribusi dan distribusi. Negara merupakan aktor yang bertanggung jawab dalam Kebijakan Luar Negeri, sedangkan kekuasaan (*power*) adalah reformulasi dari kemampuan Negara untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam proses kebijakan politik luar negeri sebuah Negara berakar dari sebuah keputusan artinya ketika dalam posisi ini penentuan Kebijakan Luar Negeri masih bersifat politis atau intra Negara.

Selanjutnya dari hasil alternative yang terbaik maka itulah yang disebut sebagai kebijakan/kebijaksanaan atau alternative yang sudah di pilih oleh pemerintah yang sudah secara legal dan siap untuk di implementasikan. Dalam implementasi tersebut jika bersifat dalam negeri ini lah yang disebut sebagai kebijakan domestic (*domestic policy*). Tetapi jika sudah melintasi batas tradisional kedaulatan Negara berupa wilayah maka fenomena ini sudah bersifat ke-HI-an dan menjadi studi hubungan internasional (Fathun. 2015: 15). Sehingga Banyu Parawita dan Muhamad Yani menjelaskan pula kebijakan politik luar negeri sebuah Negara adalah *action theory* (Banyu Parawita dan Muhamad Yani. 2005: 47), kemudian T. May Rudi melanjutkan bahwa sisi variable dari kebijakan

politik luar negeri bertumpu pada keputusan-keputusan (*decision*) dan kebijakan-kebijakan (*policies*), yang di asumsikan untuk pemilihan tujuan tertentu, pemilihan sarana dan cara implementasi (Rudy. 2003: 89). Kemudian disimpulkan oleh Holsti bahwa kebijakan politik luar negeri sebuah Negara terdiri ada empat komponen yakni : (1) orientasi kebijakan politik luar negeri, peran nasional, (3) tujuan dan (4) tindakan (Holsti K J. 1988: Bab 4).

Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat

Secara umum Kebijakan Luar Negeri Amerika di Timur Tengah bergerak di dua posisi eksklusif yang tidak sama. Pertama yaitu pendekatan global: AS beranggapan secara keseluruhan kesetabilan hubungan antara negara yang akan menghasilkan keseimbangan pada setiap negara Timur Tengah. AS berusaha membuat kebijakan negara pusat atau negara pengontrol (*state-centric*), dengan ikut campur tangan dalam masalah negeri negara Timur Tengah. Kedua yaitu AS mulai agresif mempromosikan demokrasi dengan politikus Islam di negara Timur Tengah, ini merupakan respon dari kebijakan AS dengan kebudayaan Arab yang anti- modern dan anti-Barat (Yakub, 2009).

Menelaah kembali politik luar negeri AS di kawasan Timur Tengah, maka tindakan AS yang perlu difokuskan bahwasanya AS membela kepentingan nasional yang mana dan bagaimana. Ada 2 pendekatan penting dalam menganalisa politik luar negeri AS di Timur Tengah yaitu Sistemik dan Analitik atau Sub-Sistemik, pendekatan sistemik mengawali analisa dari sistem dan menyimpulkan perubahan-perubahan sistem yang bersangkutan pada konteks yang (sering) dianggap sebagai faktor eksternal dari suatu negara yang politik luar negerinya sedang dianalisa. Tentu saja, faktor internal bukan berarti tanpa adanya sentuhan sama sekali. Kemudian untuk pendekatan analitik pada umumnya mengawali analisa dari konsep-konsep yang lebih bersifat internal seperti Teori-teori *Decision Making Process*, Teori *Power Elite*. Politik luar negeri AS sudah tentu banyak bentuk dan variasinya sehingga bisa saja menggunakan analisa perbandingan konstelasi eksekutif AS dengan berbagai asumsi-asumsi serta persepsi (Tulus, 1998: 68-69).

Dengan begitu dapat dipastikan ada hal yang diungkapkan oleh kedua pendekatan tersebut, yang kira-kira dapat dilukiskan sebagai sesuatu di antara yang eksternal dan yang internal. Menurut Wolfram (1971) bahwa permasalahan yang paling esensial dalam politik luar negeri adalah kebijaksanaan dalam negeri sekaligus luar negeri, dan bukan salah satu di antaranya, hal inilah yang disebut sebagai "*central mister*". Oleh sebab itu, peneliti riset ini berusaha secara metodologis menganalisis "*central mystery*" yang menuntut penulis menyatukan kedua pendekatan tersebut dengan lebih komprehensif atau disebut sebagai *Convergence Syndrome* yaitu syndrome pelebaran pendekatan eksternal dan internal.

Pragmatisme

Istilah pragmatisme berasal dari kata Yunani "pragma" yang berarti perbuatan atau tindakan. "Isme" di sini sama artinya dengan isme-isme yang lainnya yaitu

berarti aliran atau ajaran atau paham. Dengan demikian pragmatisme berarti: ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan. Kreteria kebenarannya adalah "faedah" atau "manfaat". Suatu teori atau hipotesis dianggap oleh pragmatisme benar apabila membawa suatu hasil. Dengan kata lain, suatu teori adalah benar *if it works* (apabila teori dapat diaplikasikan) (Mohammad, 2004: 02).

Paragmatisme Amerika Serikat

Dalam buku Albertine Minderop yang berjudul "Pragmatisme: Sikap Hidup dan Politik Luar Negeri Amerika Serikat" mengamati dan menganalisis perkembangan politik luar negeri AS bukanlah suatu pekerjaan yang ringan. Amerika Serikat memiliki pandangan politik yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan negara lainnya. Hal tersebut menurut A.M lebih disebabkan oleh pragmatisme politik yang memadukan antara nilai-nilai idealisme dan realisme politik. (Albertine, 2006: 113). Dalam pendekatannya terhadap hubungan politik, baik domestik maupun internasional, pendekatan pragmatis menggunakan landasan yang berbeda, yakni menggunakan landasan politik tradisional melalui pendekatan pada filsafat politik, hukum dan institusi dan landasan politik behavioral dengan penekanan pada proses politik, perhitungan, dan prediksi (Albertine, 2006: 114). Dengan demikian dalam pragmatisme politik bagaimana negara dapat berfungsi, dalam arti segala konsekuensi dan tindakan selalu mengacu pada individu, kelompok, dan masyarakat secara menyeluruh. Bisa dikatakan politik Amerika Serikat berorientasi pada tujuan dan hasil yang akan diperoleh, dengan tidak memperhatikan cara atau mekanisme pencapaiannya.

Pragmatisme mengandalkan peran pengalaman manusia, pada realitas dan kemajemukan (Albertine, 2006: 114). Oleh karena itu pragmatisme bersifat terbuka, fleksibel, dan pluralistik. Kebenaran terletak pada konsekuensi praktis dari suatu tindakan, kemanfaatan dan kesejahteraan demi kepuasan manusia. Berdasarkan penjelasan tersebut tidak mengejutkan apabila seringkali kita menemukan inkonsistensi dan kontroversi dalam Kebijakan Luar Negeri AS. dalam tulisan A.M berkesimpulan meskipun idealisme dan identitas dipertimbangkan dalam pengambilan Kebijakan Luar Negeri AS, namun kepentingan secara pragmatis pada akhirnya memaksa AS pada kebijakan-Kebijakan yang ironis serta kontradiktif

2. Model Kebijakan Luar Negeri

Model Wiliam D. Coplin

Model ini dicetuskan oleh Wiliam D. Coplin (1971), dalam model ini bisa di mainkan dalam keadaan damai maupun perang dalam hubungan internasional. **Strategi leadership** menyangkut cara pemimpin dalam menggunakan cara-cara tawar-menawar dalam merebut kepentingannya. Biasa menggunakan cara-cara persuasive walaupun terkadang bisa menggunakan kekerasan pula. Cara ini menitik beratkan pada kemampuan kepemimpinan seorang kepala Negara dalam merumuskan kepentingan Negara. Dalam model ini posisi Negara sangat superior atau lebih kuat dengan Negara lain.

Strategi Concordance menitik beratkan pada adanya keselarasan di antara actor-aktor yang berhubungan saling menguntungkan dan saling selaras dan menghindari ketidak sepahaman dalam politik internasional. **Strategi konfrontasi** menitik beratkan pada bagaimana salah satu actor mempertajam isu-isu konflik masa lalu karena menyadari sehingga menjadikan konfliktual dalam politik internasional. Untuk itu salah satu aktor harus menerapkan **Strategi akomodasi** untuk menengahi ketidak saling pahaman antar Zaktor.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dari penelitian ini adalah deskriptif eksplanatif, kemudian: Obyek Penelitian pemerintahan Amerika Serikat serta Kebijakan Luar Negeri AS. Lokasi Penelitian yaitu American Corner UMY, IRC's U.S. Embassy Jakarta dan lembaga pengamat Kebijakan Luar Negeri AS Indonesia. Jangkauan Penelitian dari keluarnya kebijakan-kebijakan AS dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Sumber data terdiri dari data Premier dan Sekunder, data Premier yaitu Interview IRC'S U.S. Embassy sebagai perspektif praktisi, penggiat American Corner UMY sebagai perspektif akademisi, dan pengamat Kebijakan Luar Negeri AS di Indonesia sebagai perspektif jurnalistik. Kemudian data Sekunder yaitu dari berbagai buku, jurnal, artikel, serta data-data kredibel yang diperoleh dari internet. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Hal ini karena tujuan utama dari penelitian itu sendiri adalah untuk memperoleh data. Dengan demikian, maka tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar yang ditetapkan, yaitu pengkajian:

- a) Dengan cara pengakajian data:
 - Merekam (*Recording technique*), mengutip (*Noting technique*) dan mengganti/seleksi (*Changing technique*).
- b) wawancara (*Questionere*)

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data primer dari para pihak yang dijadikan informan penelitian. Teknik wawancara dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu Pedoman Wawancara. Pedoman wawancara tersebut berisi pokok-pokok pertanyaan (*leading questions*). terbuka untuk diajukan kepada para informan penelitian.

Penilaian tentang Strategi Lawan

		Mengancam	Mendukung
Perkiraan Kemampuan Sendiri	Lebih Kuat	Konfrontasi	Kepmimpinan
	Lebih Lemah	Akomodasi	Konkordan

Sumber: John P. Lovell, *Foreign Policy in Perspective* (Holt, Rinehart Winston 1970). Hal. 99. 1.

Analisis Data; Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif, di mana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, kemudian ditarik sebuah kesimpulan (Emzir, 2010: 30). Penelitian kualitatif bertujuan memahami lebih dalam tentang tingkah manusia dan dengan alasan bahwa pemerintahan itu bersifat seperti manusia. Metode kualitatif ini meneliti “mengapa” sebagai awal diskursus dan tidak hanya berpatokan kepada apa, di mana, dan kapan. Oleh sebab itu penarikan sedikit data atau contoh menjadi fokus terhadap studi kasus atau fenomena daripada hanya sekedar banyak data tetapi tidak fokus.

PEMBAHASAN

Strategi erat kaitannya dengan menang dalam perang, taktik, serta memaksa pihak lain untuk mengikuti kehendak kita. Akan tetapi, memasuki era modern seperti ini terjadi pergeseran makna lebih luas bukan hanya seputar perang melainkan bagaimana suatu negara dapat memenuhi kepentingan nasionalnya. Strategi adalah langkah-langkah atau keputusan-keputusan yang dirancang sebelumnya dalam situasi kompetitif dimana hasil akhirnya tidak semata-mata bersifat untung-untungan. (Mochtar, 1989:09). Suatu strategi haruslah dipikirkan secara matang baik dari sisi keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan. Pembuat keputusan harus paham benar akan situasi yang sedang terjadi dan tujuan yang ingin dicapai.

Dengan demikian penulis menggunakan tipologi strategi politik luar negeri John. P. Lovell. Tujuan tipologi adalah membuat gambaran yang teratur untuk mengklasifikasikan serta mendeskripsikan suatu fenomena. Ketika dihadapkan dengan suatu obyek penelitian, tipologi akan membantu mengidentifikasi variabel-variabel yang penting dari obyek tersebut. Tipologi ini mendorong untuk berteori bahwa tipe strategi yang diambil oleh suatu negara bisa dijelaskan dengan menelaah penilaian para pembuat keputusan tentang strategi lawan dan perkiraan mereka tentang kemampuan sendiri. Terdapat empat dimensi yang menjadi komponen utama dalam tipologi strategi politik luar negeri John. P. Lovell yaitu konfrontasi, akomodasi, kepemimpinan (leadership), dan konkordan.

Apabila menganalisa Kebijakan Luar Negeri suatu negara, maka harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat Kebijakan Luar Negeri. Dan salah besar jika menganggap bahwa para pemimpin negara (para pembuat Kebijakan Luar Negeri) bertindak tanpa pertimbangan (konsiderasi). Tetapi sebaliknya tindakan luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil Kebijakan Luar Negeri.

William D. Coplin menjelaskan tentang tiga Konsiderasi sebagaimana yang disebutkan diatas yaitu: Pertama, kondisi politik dalam negeri suatu negara termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku politik manusianya. Kedua, situasi ekonomi dan militer suatu negara tersebut, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam hal pertahanan dan keamanan. Ketiga, konteks internasional, situasi di negara yang menjadi politik luar negeri serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi (William, 1971: 182).

Ada empat faktor dominan dalam Kebijakan Luar Negeri, antara lain tindakan dalam pengambilan keputusan, politik domestik, faktor ekonomi-militer, dan situasi internasional. Faktor pertama merujuk pada pemerintahan Barack Obama sebagai aktor-aktor yang memformulasikan Kebijakan Luar Negeri. Faktor kedua menjadi faktor yang mempertimbangkan kepentingan nasional Amerika Serikat yang ikut menentukan Kebijakan Luar Negerinya. Faktor ketiga adanya pertimbangan atas kekuatan ekonomi dan militer Amerika Serikat dan negara-negara yang terlibat dalam sengketa. Serta faktor keempat yang merujuk pada perubahan situasi internasional (William, 1971: 159-185). Namun faktor yang lebih difokuskan adalah faktor pertama yang merujuk pada pemerintahan Barack Obama sebagai aktor-aktor yang memformulasikan Kebijakan Luar Negeri.

Strategi Kepemimpinan

Dalam model ini posisi Negara sangat superior atau lebih kuat dengan Negara lain. Ini tercermin dalam Sikap hati-hati Obama bisa dimengerti. Ia dipilih untuk menghentikan keterlibatan Washington dalam perang di luar negeri. Biar bagaimanapun, serbuan Amerika ke Iraq tahun 2003 dan kekacauan berdarah setelahnya, diyakini banyak pakar sebagai penyebab utama runtuhnya struktur kenegaraan Irak. Konflik sektarian dan etnis yang muncul kemudian, menyebar hingga ke perang saudara di Suriah.

Serangan udara telah memperlambat laju ofensif *Islamic State* tetapi tidak menghentikan mereka, baik di Suriah maupun Irak. Namun laporan terbaru menyebutkan, milisi ISIS kini sudah merangsak hingga ke kawasan seputar ibukota Irak, Bagdad. Disebut-sebut, bandara Bagdad kini berada dalam jarak tembak artileri milisi. Di Washington kritik terhadap strategi serangan udara Obama juga makin meningkat. Kini dipertimbangkan pengiriman pasukan khusus menarget pimpinan milisi. Tapi itu tidak akan menenangkan kelompok ultra konservatif Partai Republik, yang mendesak pengiriman segera pasukan darat. Tapi untuk sementara itu, publik Amerika masih mendukung pendekatan hati-hati dari Obama. Ada beberapa alasan politis yang berkaitan dengan dukungan Amerika Serikat atas pihak oposisi guna meruntuhkan pemerintahan Bassar al-Assad, yaitu pertama, runtuhnya kepemimpinana Bassar al-Assad akan memperkokoh posisi Israel dan kesejahterannya telah menjadi landasan kebijakan Amerika Serikat (Nining, 2015: 42-44). Jatuhnya bassar al-Assad akan merubah konstalasi kekuatan politik di Suriah. Posisi Amerika Serikat bisa menjadi kuat dibandingkan sebelumnya mengingat pemerintahan pasca era basar al-Assad diharapkan oleh Amerika Serikattunduk kepada kepentingannya. Lengsernya Bassar al-Assad dianggap sebagai peluang bagi Amerika Serikat untuk menjalin hubungan baik dengan Suriah karena selama ini resim Bassar al-Assad adalah figur yang secar terang-terangan memiliki keberanian setelah Iran untuk menentang hegemoni Amerika Serikat.

Strategi Konkordan

Strategi ini bermaksud menitik beratkan pada adanya keselarasan di antara actor-aktor yang berhubungan saling menguntungkan dan saling selarasa dan menghindari ketidak sepahaman dalam politik internasional. Dalam istilah konkordan ini kedua negara memilih untuk mencari jalan win win solution dimana posisi keduanya saling menguntungkan. Bagi negara yang lebih lemah, untuk menghindari konflik dengan

negara yang lebih kuat negara tersebut lebih memilih membuat kebijakan yang tidak berpeluang menimbulkan konflik dengan negara lebih kuat dan cenderung mendukung inisiatif-inisiatif dari negara tersebut.

Seperti diketahui keadaan di Suriah sangat rumit, masing-masing pihak oposisi tidak terkoordinasi dengan baik, masing-masing mempunyai pemimpin dan tujuan berbeda. Para pengunjuk rasa dan tentara pembontak tidak saling bersinergi dan tidak terkoordinasi, masing-masing pihak berbeda malah saling bertikai. Iran malah menuduh bahwa yang membunuh pengunjuk rasa dengan senjata kimia tersebut adalah tentara pembelot yang dibiayai oleh asing. Dikhawatirkan pasca serangan AS, apakah berhasil atau tidak, yang pasti Suriah akan seperti negeri rimba. Siapa yang kuat dia yang menang, dan rakyat Suriah akan semakin menderita.

Mencermati langkah Al-Baghdadi serta pengikutnya, dan bagaimana AS menyikapi kelompok ini. Presiden Barack Obama mulai melangkah mundur setelah selama sepekan lalu mengancam akan segera mengagresi Suriah atas tuduhan penggunaan senjata kimia oleh pemerintah Damaskus. Sebelumnya, Obama menyebut serangan senjata kimia sebagai sebuah ancaman bagi AS dan sekutunya, oleh sebab itu serangan tersebut tidak boleh dibiarkan dan harus segera ditindak (Jery. 2013). Sebagian pengamat memandang perubahan sikap presiden AS itu berhubungan dengan transformasi terbaru di tingkat regional dan internasional.

Obama tidak dapat menarik kesepakatan internasional melalui persetujuan Dewan Keamanan PBB untuk menyerang Suriah. Padahal selama ini tiga resolusi untuk meningkatkan tekanan terhadap Suriah telah diusulkan oleh Barat dan sekutunya kepada Dewan Keamanan, namun ketiga resolusi itu telah diveto oleh anggota tetap lainnya seperti Rusia dan Cina. Baru-baru ini Inggris juga mengusulkan sebuah draf resolusi untuk memperoleh persetujuan serangan militer ke Suriah dari Dewan Keamanan, namun lagi-lagi upaya tersebut gagal.

Strategi Konfrontasi

Strategi ini menitik beratkan pada bagaimana salah satu actor mempertajam isu-isu konflik masa lalu karena menyadari sehingga menjadikan konfliktual dalam politik internasional. Konfrontasi ialah sikap terang-terangan, permusuhan, pertentangan, berhadapan secara langsung. Apabila suatu negara merasa lebih kuat dibandingkan dengan negara lain dan posisi negara tersebut terancam, negara tersebut cenderung akan mengambil jalan konfrontasi dengan mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki seperti ekonomi dan militer. Bentuk konfrontasi tersebut antara lain bisa berupa embargo, boikot, maupun serangan militer

Presiden Amerika Serikat, Barack Obama menyatakan bahwa Amerika Serikat akan terus ikut campur dan punya peran di Timur Tengah. Obama juga menyatakan bahwa selama puluhan tahun, Amerika Serikat memiliki kepentingan di kawasan tersebut, seperti kontra terorisme, menghentikan penyebaran senjata nuklir, mengamankan perdagangan bebas, menjaga keamanan, dan membela keamanan Israel serta berusaha mendamaikan konflik Arab-Israel.

Dengan ikut campurnya Amerika Serikat dalam menangani ISIS di Irak dan Suriah, membuktikan bahwa Amerika Serikat mempunyai kepentingan sendiri terhadap

Irak dan Suriah. Alasan intervensi yang dilakukan Amerika Serikat mencakup dua kepentingan, yaitu :

a. Middle Range Objectives

Berupa kebutuhan untuk meningkatkan perekonomian melalui eksplorasi sumber alam terutama minyak dan gas.

b. Long Range Goals

Merupakan suatu pendekatan teori yang mengarah pada rencana jangka panjang dan sebagai penentu sebagai strategi, yang kemudian diikuti dengan tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi tersebut berguna untuk mengarahkan suatu organisasi mencapai suatu tujuan (Adeodatus, 2014: 8).

Pasukan militer Amerika Serikat dan negara mitranya terus melancarkan serangan udara terhadap pasukan ISIS di Suriah dan Irak selama dua hari belakangan, kata Departemen Pertahanan Amerika Serikat.¹ Pesawat-pesawat pengebom dan pesawat tempur melancarkan tujuh serangan udara di Suriah dan 14 serangan udara di Irak menurut departemen tersebut. Serangan udara di wilayah Al Hasakah di Suriah menghancurkan empat unit taktis, tujuh kendaraan, dua kendaraan lapis baja, satu peti kemas, dan tiga posisi ISIS. Negara-negara koalisi yang melancarkan serangan udara di Irak meliputi Amerika Serikat, Australia, Belgia, Kanada, Denmark, Prancis, Belanda dan Inggris. Negara-negara koalisi yang melancarkan serangan udara di Suriah meliputi Amerika Serikat, Bahrain, Jordania, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Laporan terakhir mengatakan sekitar 200 ribu orang telah mengungsi dari Kobane dan dari desa sekitarnya sejak pertempuran terjadi.² Pada Rabu, Presiden AS Barack Obama mengatakan AS akan tetap meningkatkan perlawanan terhadap ISIS.

Strategi Akomodasi

Akomodasi berarti kompromi yang dilakukan oleh negara lemah ketika negara yang dihadapinya merupakan kekuatan yang mengancam. Negara yang lemah berupaya untuk menghindari terjadinya konflik dengan negara yang lebih kuat meskipun ada kemungkinan negara lemah tersebut dapat menggunakan strategi konfrontasi ketika kekuatan negara yang kuat meningkat. Kompromi tersebut bisa berbentuk diplomasi, lobbying, nota protes, dan lain-lain.

Presiden AS Barack Obama, mengakui pemerintahannya meremehkan ancaman Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Suriah.³ Obama menambahkan Washington juga terlalu menaruh kepercayaan terhadap keefektifan pasukan keamanan Irak, yang sudah dilatih dan dipersenjatai AS namun dengan mudah dikalahkan pasukan ISIS saat menyapu wilayah utara negeri itu. Saat diwawancarai stasiun televisi CBS, Obama mengakui pemerintahannya tak menyangka konflik bersenjata Suriah yang sudah berlangsung hampir empat tahun ini justru menjadi tempat kelompok-kelompok militan

¹ *Koalisi Serangan Udara AS Kian Meningkatkan terhadap ISIS*. Diakses pada 9 November 2015 | 12.12 WIB. (<http://www.konfrontasi.com/content/global/koalisi-lanjutkan-serangan-udara-terhadap-isis#sthash.2WwRw3ba.dpuf>).

² *Ibid*.

³ Obama Akui AS Remehkan Ancaman ISIS. Diakses Pada 25 Oktober. 2015. Jam 09.30 WIB. (<http://internasional.kompas.com/read/2014/09/29/16591101/Obama.Akui.AS.Remehkan.Ancaman.ISIS>)

memperkuat diri dan kembali menebar bahaya. Obama menambahkan para pejuang Al Qaeda yang diusir dari Irak oleh pasukan AS sebelum ditarik mundur pada 2011 dengan bantuan suku-suku Sunni Irak ternyata mampu membenahi diri di Suriah dan menciptakan ISIS yang lebih berbahaya.

Untuk penyelesaian masalah yang lebih permanen maka harus ada perubahan tak hanya di Irak namun juga di negara-negara lain seperti Suriah dan negara-negara lain di kawasan harus memahami apa arti akomodasi politik. Saya kira kepala badan-badan intelijen, Jim Clapper, telah mengakui bahwa mereka sudah meremehkan situasi di Suriah,"⁴ mengacu kepada direktur intelijen nasional AS. Washington juga terlalu mempercayai kemampuan pasukan Irak yang telah dilatih AS dalam memerangi kelompok militan, Obama membenarkan situasi tersebut. Lebih jauh, Obama mengatakan kemampuan Suriah dan Irak menyelesaikan krisis politik dalam negerinya akan memberikan dampak positif untuk menyelesaikan masalah yang lebih besar.

Rakyat Suriah telah kehilangan hak untuk menentukan nasib mereka sendiri sebagai akibat dari meluasnya konflik ke tingkat internasional. Namun untuk menyelesaikan krisis Suriah tanpa konsensus internasional, tidaklah mungkin. Tak satu pun pihak di Suriah sekarang memiliki pilihan selain menerima "internasionalisasi" ini. Terlepas dari fakta bahwa solusi akan disesuaikan dengan standar internasional, bukan Suriah. "Jenewa-2" akan memberi kesempatan pada masyarakat internasional untuk berkonsentrasi pada penyelesaian krisis Suriah. Bukan hanya mendukung salah satu pihak yang bertikai. Tugas "Jenewa-2" adalah memindahkan krisis Suriah dari aliran militer ke aliran politik. Hal ini dapat membuka pintu bagi masyarakat sipil, agar mereka menyatakan keberadaan diri mereka dan menjadi elemen utama dalam proses pemulihan Suriah.⁵

Masyarakat internasional tidak ingin supaya seseorang mengambil keputusan atas namanya atau menjadi polisi dunia. Sejarah, terutama perang-perang yang diikuti oleh Amerika, menunjukkan bagaimana masyarakat terbelah setelah intervensi militer dan konflik berkepanjangan dan destruktif yang diakibatkan olehnya.

Apa yang mengkhawatirkan kita, sebagai rakyat Suriah, adalah tahap berikutnya dari kerjasama AS-Rusia: berhasilkah Rusia memaksa rezim Suriah untuk membuat konsesi yang nyata demi penyelesaian secara politik. Sampai saat ini, mereka hanya membatasi pada penghancuran senjata kimia. Namun, senjata itu menjadi bagian dari konflik Suriah baru-baru ini saja. Dan fakta bahwa rezim berkolaborasi dalam penghancuran senjata kimia, tidak pernah akan cukup supaya kami percaya bahwa ini adalah bukti kesediaannya untuk mengambil jalan penyelesaian secara politik.⁶ Konsensus Rusia-Amerika memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk berhenti memberi dukungan kepada salah satu pihak dalam konflik dan mulai mendukung penyelesaian konflik itu sendiri. Selain itu juga untuk mendukung koalisi

⁴ *Ibid.*

⁵ Peran Rusia dan Amerika Serikat dalam Konflik Suriah. Diakses 12 Oktober 2015 | 12.00 WIB. (http://indonesia.rbth.com/politics/2013/10/16/peran_rusia_dan_amerika_serikat_dalam_konflik_suriah_2_2625).

⁶ *Ibid.* RBTH berkesempatan menanyakan hal ini kepada Rim Turkmani, Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Suriah "Madany" (<http://madanisyria.com>), yang bergerak dalam pengembangan masyarakat sipil di Suriah, yang berbasis di London.

yang akan muncul setelah konferensi “Jenewa-2”. Ini akan membuat peran Rusia dapat diterima oleh sebagian besar pihak Suriah, bukan hanya oleh rezim.

Rusia dapat bergantung pada masyarakat sipil Suriah. Kehadiran perwakilan masyarakat sipil pada konferensi “Jenewa-2” diperlukan untuk keberhasilan konferensi secara keseluruhan. Bagaimanapun juga, masyarakat sipil Suriahlah yang paling mampu mengekspresikan aspirasi rakyat Suriah dan menyampaikan pandangan rakyat Suriah tanpa polarisasi pendapat. Partisipasi perwakilan masyarakat sipil dalam negosiasi dan dalam masa transisi diperlukan untuk keberhasilan proses ini.

Kesimpulan

Inkonsistensi kebijakan Luar Negeri AS merupakan diskripsi dan persepsi masyarakat dunia terhadap AS masa kini, yakni Kebijakan Luar Negeri yang tidak sesuai dengan kesepakatan/keputusan awal internal baik eksekutif maupun legislatif pemerintah AS

Menurut Penulis kondisi yang lambat dan sabar ini (tarik ulur) merupakan sebuah perhitungan yang tidak jarang AS dipandang inkonsisten oleh dunia atau politik standar ganda menjadi cerita klasik masa lalu dan kini. bahwasanya dibalik inkonsistensi AS terhadap negara lain adalah adanya kepentingan nasional yang ingin dicapai AS seperti kepentingan ekonomi dan strategis, kemudian dibalik inkonsistensi AS sangat membahayakan keamanan internasional dengan ada inkonsistensi tersebut justru memperkeruh hubungan AS dengan negara lain. Amerika Serikat sedari awal sudah berkemimian untuk memberi kestabilan pada Timur Tengah, namun sejauh ini itu belum terwujud secara nyata.

Pragmatisme yang merupakan *the way of life* bangsa Amerika. AS juga mengakui bahwa politik luar negeri adidaya itu adalah pragmatisme dan AS selalu menjadi “pendamai”, pragmatisme mengajarkan betapa pentingnya pengalaman sebagai bagian dari perkembangan dan kemajuan hidup manusia. Pragmatisme politik bagaimana negara dapat berfungsi, dalam arti segala konsekuensi dan tindakan selalu mengacu pada individu, kelompok, dan masyarakat secara menyeluruh. Bisa dikatakan politik Amerika Serikat berorientasi pada tujuan dan hasil yang akan diperoleh, dengan tidak memperhatikan cara atau mekanisme pencapaiannya. Tidak mengejutkan apabila seringkali kita menemukan inkonsistensi dan kontroversi dalam Kebijakan Luar Negeri AS. meskipun idealisme dan identitas dipertimbangkan dalam pengambilan Kebijakan Luar Negeri AS, namun kepentingan secara pragmatis pada akhirnya memaksa AS pada kebijakan-Kebijakan yang ironis serta kontradiktif.

Secara umum Kebijakan Luar Negeri Amerika di Timur Tengah bergerak di dua posisi eksklusif yang tidak sama yaitu pendekatan global: AS beranggapan secara keseluruhan kesetabilan hubungan antara negara yang akan menghasilkan keseimbangan pada setiap negara Timur Tengah. AS berusaha membuat kebijakan negara pusat atau negara pengontrol (state-centric), dengan ikut campur tangan dalam masalah negeri negara Timur Tengah. AS mulai agresif mempromosikan demokrasi dengan politikus Islam di negara Timur Tengah, ini merupakan respon dari kebijakan AS dengan kebudayaan Arab yang anti- modern dan anti-Barat.

Tindakan ISIS yang brutal, primitif dan berbau SARA tentu sangat berseberangan dengan ide-ide perlindungan Hak Asasi Manusia. Atas dasar itu banyak negara yang bergabung demi mengentikan ISIS dan mengurangi masalah yang timbul di Kawasan Timur Tengah. Selain negara-negara yang bergabung bersama Amerika tersebut adapula yang bergerak sendiri. Yang menarik dalam persoalan ini adalah bagaimana praktik-praktik yang dilakukan oleh negara tetangga sesama Kawasan Timur Tengah terhadap negara yang menjadi korban ISIS, yaitu Irak dan Suriah. Kemudian dipersimpangan jalan ada gejala ketidakpercayaan atau sedikit perlawanan dari pemerintah Suriah yaitu menfaat determinasi Putin sebagai kepala pemerintahan Rusia, Solusi krisis Suriah kini tidak bisa lepas dari peranan Rusia.

Penulis menemukan bahwa langkah yang dilancarkan Barat dan aliansinya terbukti gagal tumbangkan Assad dan justru perbesar kekuasaan ISIS. Jika diperhatikan saksama, terdapat praktik yang kompleks dari negara-negara tersebut dalam menyikapi praktik ISIS. Pada Negara tertentu ada yang pergerakannya sulit dipahami karena pertimbangan keadaan, adapula yang tidak mau ikut campur terlalu dalam, dan adapula yang bergerak setengah hati, seperti Arab Saudi, Qatar, Iran, dan Turki adalah 4 negara yang memiliki pengaruh yang cukup besar dalam stabilitas Kawasan Timur Tengah.

Rusia sebagai mediator penting yang selalu mendukung rezim, meskipun bermasalah, masih tetap lebih kohesif daripada pihak oposisi. Amerika Serikat mendukung oposisi yang tidak mempunyai kesatuan dan ini menjadi masalah bagi Washington. Pemerintahan Obama telah mencoba untuk mengubah situasi dengan cara pemberian bantuan militer kepada oposisi, kemudian dengan bantuan ancaman intervensi. Tetapi pada akhirnya mereka terpaksa untuk menerima inisiatif Rusia. Secara umum, posisi Amerika ditandai oleh ketiadaan strategi politik yang jelas dan ketidakmampuan untuk memahami semua seluk-beluk realitas Suriah.

Secara keseluruhan dalam penelitian ini adalah Konsensus Rusia-Amerika seharusnya memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk berhenti memberi dukungan kepada salah satu pihak dalam konflik dan mulai mendukung penyelesaian konflik itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adelina, Monica Dian. 2012. *Dinamika Politik Luar Negeri AS terhadap Kelompok Uighur (2002-2012)*. Jakarta: FISIP UI.
- Alliso, Graham & Zelikow, Philip. 1999. *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis, Second Edition*, New York: Longham.
- D. Coplin, William. 1971. *Introduction to International Politics : A Theoretical Overview*. Chicago: Markham Publishing Company.
- Emzir. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- F. Hanrieder Wolfram. 1971. *Comparative Foreign Policy, Theoretical essay*. New York: David Mc. Kay Company Inc.

- Hanrieder, Wolfram F. 1971. *Comparative Foreign Policy, Theoretical essay*. New York: David Mc. Kay Company Inc.
- Jatmika, Sidik. 2000. *AS Penghambat Demokrasi: Membongkar Politik Standar Ganda AS*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.
- Mas'ood, Mochtar. 1989. *Ilmu Hubungan Internasional, Tingkat Analisis dan Teorisasi*". Yogyakarta: Pusat antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada.
- Minderop, Albertine. 2006. *Pragmatisme-Sikap Amerika dan Prinsip Politik Luar Negeri Amerika*; Ed .I. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Najib Abdullah, Mohammad. 2004. *Pragmatisme: Sebuah Tinjauan Sejarah Intelektual Amerika*. Medan: Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara
- Rudy, T. May. 2003. *Studi Strategis, Transformasi Pasca Perang Dingin*. Bandung: Rafika Aditama.
- Yani, Septi. 2014. *Sikap Amerika Serikat Terhadap Gerakan Islamic State Iraq and Syria*. Jakarta: Univeristas Prof. DR. Mostopo.
- Yakub Hal.abi. 2009. *US Foreign Policy in the Middle East; from Crsisis to Change*. England: Asghate.
- Warsito, Tulus. 1998. *Terori-Teori Politik Luar Negeri: Relavansi dan Keterbatasannya*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

Jurnal

- Cordesman, Anthony H.. 2014. *The New "Great Game" in the Middle East: Looking Beyond the "Islamic State"*.pdf.
- Fathun. 2015. *Materi Kuliah ke I Pengambilan keputusan dalam Hubungan Internasional.I*. Makassar: UNIFA.
- Holsti K J. 1988. *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis*. Jakarta: Erlangga. Bab 4..
- Nining Anggriani. 2015. *Sikap Amerika Serikat Terhadap Geraakan ISIS Di Irak & Suriah*. Makassar: Fspol UNHAS.
- Parawita, Banyu dan Yani, Muhamad. 2005. *Action Theory Lumba, Adeodatus. intervensi militer Amerika Serikat dalam konflik politik di Suriah tahun 2011*. 2014.

Internet

- Jery. 2013. *Perubahan Sikap Ppresiden AS terkait Serangan ke Suriah*. Diakses pada 9 November 2015 | 12.12 WIB. (<http://www.sinarpaginews.com/templates/sinarpaginews/favicon.ico>).
- IRIB Indonesia/PH. 2014. *Kelemahan AS Perangi ISIS*. Diakses 27 November 2015. Pada jam 14.00 WIB. (http://indonesian.irib.ir/component/jcomments/feed/com_k2/86478).
- Peran Rusia dan Amerika Serikat dalam Konflik Suriah. Diakses 12 Oktober 2015 | 12.00 WIB. (http://indonesia.rbth.com/politics/2013/10/16/peran_rusia_dan_amerika_serikat_dalam_konflik_suriah_22625).